



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 65 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan /atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, maka perlu penyesuaian perhitungan rincian Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 38 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/ Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
6. Peraturan Bupati Paser Nomor 38 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 Nomor 38).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 Nomor 38) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 20 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Alokasi Dasar Adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional
5. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
6. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
7. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan Desa, Luas Wilayah dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
8. Indeks Kemahalan Kontruksi yang selanjutnya disingkat dengan IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan Geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar daerah.
9. Indeks Kesulitan Geografis desa yang selanjutnya disebut IKG desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar. Kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
10. Kantor Pelayan Perbendaharaan Negara yang disingkat dengan KPPN adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan KPA adalah Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.

12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat dengan Kepala DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser.
13. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Selanjutnya Disingkat dengan BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser.
14. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Kepala DPMD adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser.
15. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat dengan RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh menteri keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayr seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seleruh penerimaan daeah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat dengan RKD adalah Rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disingkat dengan PADes adalah segenap pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas Desa, diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan Peraturan desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (13) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemotongan Dana Desa Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD
- (3) Pemotongan Dana Desa Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar yang sama dengan surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar penyaluran Dana Desa
- (5) Pemotongan Dana Desa dicatat dengan menggunakan akun penerimaan non anggaran
- (6) Penyaluran Dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil pemotongan Dana Desa.
- (7) Pejabat Pembuat Komitmen yang ditetapkan oleh Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), melalui penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.

- (8) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pejabat penandatangan Surat Perintah membayar menerbitkan Surat Perintah membayar untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
 - (9) Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan surat Perintah Pencairan dana untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
 - (10) Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9), dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4).
 - (11) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Kepala KPPN dan Bupati melalui Kepala BKAD Kabupaten Paser yang ditembuskan kepada Kepala DPMD Kabupaten Paser.
 - (12) Kepala KPPN menyampaikan salinan surat perintah pencairan Dana Penyaluran dana hasil pemotongan dana desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (9), kepada Kepala BKAD Kabupaten Paser.
 - (13) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 11 ayat (13) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati dengan ketentuan :

- a. Tahap I berupa :
 1. Peraturan Bupati mengenai Tata cara pembagian dan penetapan Rincian dana Desa setiap Desa;
 2. Peraturan Desa Mengenai APBDes; dan
 3. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa.
 - b. Tahap II tanpa dokumen :
 - c. Tahap III berupa :
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penerapan rincian Dana Desa setiap desa atau keputusan bupati mengenai penetapan rincian dana desa setiap desa;
 2. Peraturan desa mengenai APBDes;
 3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 4. Laporan realisasi penyerapan dan capaian dana desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50%(lima puluh persen).
- (2) Bupati melalui Kepala BKAD bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 untuk seluruh desa dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
 - (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c angka 4 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian dari seluruh kegiatan setiap desa.
 - (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 4, dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
 - (5) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)) disampaikan dengan Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Kepala BKAD.
 - (6) Pemerintah Daerah menandai pengajuan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) atas desa yang layak salur melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

- (7) Dokumen persyaratan Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk fisik (Hardcopy) dan atau dokumen elektronik (softcopy).
 - (8) Dokumen elektronik (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Ditrektorat Jenderal Perbendaharaan.
5. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 12A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12 A

- (1) Dalam hal desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (1) dengan tambahan ketentuan :
 - a. Dana desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) kali , dengan besaran :
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
 - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
 - c. Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - d. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (13) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c.

- (2) Dalam hal desa telah salur dana desa tahap I, dan dapat disalurkan dengan persyaratan :
- a. Penyaluran dana desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran;
 1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. Penyaluran kedua 15% (lima belas persen); dan
 3. Penyaluran ketiga 10% (sepuluh persen).
 - b. Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - c. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c.
- (3) Dalam hal desa telah salur dana desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (13) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c.
6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati melalui Kepala BKAD, dengan ketentuan:
- a. Tahap I tanpa dokumen persyaratan;
 - b. Tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
 - c. Tahap III berupa :
 1. peraturan Desa mengenai APBDes;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).

- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati melalui Kepala BKAD, dengan ketentuan :
 - a. Tahap I tanpa dokumen; dan
 - b. Tahap II berupa :
 1. Peraturan desa mengenai APBDes;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
 - c. Tahap III berupa :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
 2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dan angka 3 dan ayat (2) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan desa.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.
- (5) Bupati melalui Camat melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati melalui Kepala BKAD menyampaikan dokumen persyaratan atas desa yang layak salur kepada KPPN selaku KPA penyaluran dana DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.

- (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati melalui Kepala BKAD untuk dilakukan pemutakhiran.
7. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 14A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A

- (1) Dalam hal desa belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Dana Desa disalurkan dengan ketentuan:
- a. Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
 1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. Penyaluran kedua 15% (lima belas persen); dan
 3. Penyaluran ketiga 10% (sepuluh persen).
 - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
 1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. Penyaluran kedua 15% (lima belas persen); dan
 3. Penyaluran ketiga 10% (sepuluh persen).
 - c. Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - d. Tahap III dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf c.
- (2) Dalam hal desa telah salur dana desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4):
- a. Penyaluran dana desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
 1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. Penyaluran kedua 15% (lima belas persen); dan
 3. Penyaluran ketiga 10% (sepuluh persen).
 - b. Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan

- c. Tahap III sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (13) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf c.
 - (3) Pengajuan permohonan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) dan huruf b dan ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Bupati kepada KPPN.
8. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan mengacu pada prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
 - (2) Prioritas Dana Desa dimaksud ayat (1), termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), berupa :
 - a. Kegiatan penanganan pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan atau
 - b. Jaringan pengaman social di desa.
 - (3) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada perioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
9. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 Pasal yaitu Pasal 15 A dan Pasal 15 B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Jaring pengaman sosial di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, berupa BLT Desa keluarga miskin atau tidak mampu di desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diprioritaskan oleh Pemerintah Daerah melalui Dana Desa.

- (4) Calon penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan; dan
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan program keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja.
- (5) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar :
 - a. Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat; dan
 - b. Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan selama 6 (enam) Bulan paling cepat Bulan April 2020.
- (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal 15B

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A ayat (2) dan ayat (3) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengelolaan Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

- (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada saat Rancangan Peraturan Desa Mengenai APBDes.

10. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17, disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16A

Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dalam Pasal 15A ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.

11. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

12. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya dengan bupati paling lambat minggu kedua bulan Oktober 2020.
- (2) Kepala Desa menyetorkan sisa dana di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Oktober 2020.
- (3) Sisa Dana Desa tahun 2019 yang masih berada di RKUD, dapat disalurkan ke RKD paling lambat bulan Juli 2020.

- (4) Bupati melakukan rekonsiliasi dengan kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa atas data komulatif sisa Dana Desa tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang disetor oleh kepala desa ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sisa dana di RKUD tahun 2015 sampai dengan 2019 yang tidak disalurkan ke RKD paling lambat akhir bulan November 2020.
 - (5) Bupati menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke RKUN paling lambat akhir bulan Desember.
 - (6) Dalam hal bupati tidak menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menteri keuangan memperhitungkan sisa dana desa tersebut melalui pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil tahun anggaran berikutnya.
 - (7) Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Hagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jendral Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
 - (8) Dalam hal sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2020, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan pada saat penyaluran Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2020.
 - (9) Perhitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
13. Ketentuan Pasal 22 ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Ketentuan mengenai :

- a. Format Laporan realisasi Penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) dan (2);
- b. Format Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3);
- c. Format Laporan Konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (1) serta Pasal 14 ayat (2);

- d. Format Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (5);
- e. Format lembar konfirmasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 11; dan
- f. Format Laporan pelaksanaan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A dan Pasal 14 A.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pemohon penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2020 :

- a. yang telah disampaikan kepala Desa kepada Bupati dan/atau diajukan ke KPPN; dan
- b. yang telah disampaikan oleh Bupati kepada KPPN namun perlu penyesuaian/ perbaikan Dokumen,

Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2020 tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PKM.7/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa .

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 10 Juni 2020

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 10 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2020 NOMOR 65.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER

ttd

ANDI AZIS
NIP19680816 199803 1 007

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PASER
NOMORTAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA KABUPATEN PASER
TAHUN ANGGARAN 2020

| NO | KECAMATAN/DESA | NOMOR REKENING | DANA DESA (DD) TA. 2020 (Rp) | BESARAN PENYALURAN | | |
|----------|--------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| | | | | TAHAP I (40%) (Rp) | TAHAP II (40%) (Rp) | TAHAP III (20%) (Rp) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Batu Engau | | 12,263,933,000 | 4,961,769,600 | 4,905,573,200 | 2,396,590,200 |
| 1 | Bai Jaya | 0021418960 | 877,325,000 | 355,252,800 | 350,930,000 | 171,142,200 |
| 2 | Kerang Dayo | 0021415316 | 1,079,785,000 | 436,236,800 | 431,914,000 | 211,634,200 |
| 3 | Mengkudu | 0021404888 | 861,311,000 | 348,847,200 | 344,524,400 | 167,939,400 |
| 4 | Tampakan | 0021406963 | 727,256,000 | 295,225,200 | 290,902,400 | 141,128,400 |
| 5 | Petangis | 0021404932 | 948,393,000 | 383,680,000 | 379,357,200 | 185,355,800 |
| 6 | Tebru Paser Damai | 0021419044 | 781,403,000 | 316,884,000 | 312,561,200 | 151,957,800 |
| 7 | Kerang | 0021404849 | 1,515,630,000 | 610,574,800 | 606,252,000 | 298,803,200 |
| 8 | Riwang | 0021404914 | 1,279,504,000 | 516,124,400 | 511,801,600 | 251,578,000 |
| 9 | Lomu | 0021404856 | 920,950,000 | 372,702,800 | 368,380,000 | 179,867,200 |
| 10 | Pengguren Jaya | 0021419079 | 801,183,000 | 324,796,000 | 320,473,200 | 155,913,800 |
| 11 | Saing Prupuk | 0021419036 | 781,801,000 | 317,043,200 | 312,720,400 | 152,037,400 |
| 12 | Langgai | 0021404927 | 841,373,000 | 340,872,000 | 336,549,200 | 163,951,800 |
| 13 | Segendang | 0021404867 | 848,019,000 | 343,530,400 | 339,207,600 | 165,281,000 |
| 2 | Batu Sopang | | 7,506,337,000 | 3,041,440,000 | 3,002,534,800 | 1,462,362,200 |
| 1 | Songka | 0021400131 | 830,281,000 | 336,435,200 | 332,112,400 | 161,733,400 |
| 2 | Legai | 0021404798 | 748,177,000 | 303,593,600 | 299,270,800 | 145,312,600 |
| 3 | Sungai Terik | 0021404809 | 777,499,000 | 315,322,400 | 310,999,600 | 151,177,000 |
| 4 | Busui | 0021404775 | 889,439,000 | 360,098,400 | 355,775,600 | 173,565,000 |
| 5 | Kasungai | 0021404816 | 832,042,000 | 337,139,600 | 332,816,800 | 162,085,600 |
| 6 | Rantau Buta | 0021404829 | 827,415,000 | 335,288,800 | 330,966,000 | 161,160,200 |
| 7 | Rantau Layung | 0021404832 | 854,200,000 | 346,002,800 | 341,680,000 | 166,517,200 |
| 8 | Samuranggau | 0021404768 | 799,874,000 | 324,272,400 | 319,949,600 | 155,652,000 |
| 9 | Batu Kajang | 0021404785 | 947,410,000 | 383,286,800 | 378,964,000 | 185,159,200 |
| 3 | Kuaro | | 9,960,986,000 | 4,036,268,000 | 3,984,394,400 | 1,940,323,600 |
| 1 | Klempang Sari | 0021408382 | 855,890,000 | 346,678,800 | 342,356,000 | 166,855,200 |
| 2 | Keluang Paser Jaya | 0021400706 | 778,507,000 | 315,725,600 | 311,402,800 | 151,378,600 |
| 3 | Pasir Mayang | 0021405215 | 1,098,736,000 | 443,817,200 | 439,494,400 | 215,424,400 |
| 4 | Harapan Baru | 0021405183 | 863,781,000 | 349,835,200 | 345,512,400 | 168,433,400 |
| 5 | Kerta Bumi | 0021406373 | 785,890,000 | 318,678,800 | 314,356,000 | 152,855,200 |
| 6 | Lolo | 0021405157 | 767,076,000 | 311,153,200 | 306,830,400 | 149,092,400 |
| 7 | Sandelely | 0021405179 | 835,268,000 | 338,430,000 | 334,107,200 | 162,730,800 |
| 8 | Pondang Baru | 0021415260 | 809,799,000 | 328,242,400 | 323,919,600 | 157,637,000 |
| 9 | Kendarom | 0021417386 | 738,943,000 | 299,900,000 | 295,577,200 | 143,465,800 |
| 10 | Padang Jaya | 0021416274 | 764,483,000 | 310,116,000 | 305,793,200 | 148,573,800 |
| 11 | Modang | 0021405208 | 845,453,000 | 342,504,000 | 338,181,200 | 164,767,800 |
| 12 | Rangan | 0021405194 | 817,160,000 | 331,186,800 | 326,864,000 | 159,109,200 |
| 4 | Long Ikis | | 21,248,568,000 | 8,607,497,200 | 8,499,427,200 | 4,141,643,600 |
| 1 | Tajer Mulya | 0021418391 | 835,974,000 | 338,712,400 | 334,389,600 | 162,872,000 |
| 2 | Pait | 0021405273 | 787,304,000 | 319,244,400 | 314,921,600 | 153,138,000 |
| 3 | Krayan Makmur | 0021406999 | 935,958,000 | 378,706,000 | 374,383,200 | 182,868,800 |
| 4 | Lombok | 0021405260 | 770,527,000 | 312,533,600 | 308,210,800 | 149,782,600 |
| 5 | Jemparing | 0021405300 | 811,922,000 | 329,091,600 | 324,768,800 | 158,061,600 |
| 6 | Adang Jaya | 0021415359 | 812,061,000 | 329,147,200 | 324,824,400 | 158,089,400 |
| 7 | Teluk Waru | 0021405239 | 753,691,000 | 305,799,200 | 301,476,400 | 146,415,400 |
| 8 | Samuntai | 0021405257 | 851,137,000 | 344,777,600 | 340,454,800 | 165,904,600 |
| 9 | Kayungo | 0021405315 | 740,538,000 | 300,538,000 | 296,215,200 | 143,784,800 |
| 10 | Krayan Jaya | 0021406970 | 761,661,000 | 308,987,200 | 304,664,400 | 148,009,400 |
| 11 | Kerta Bhakti | 0021407033 | 902,125,000 | 365,172,800 | 360,850,000 | 176,102,200 |
| 12 | Brewe | 0021400084 | 750,553,000 | 304,544,000 | 300,221,200 | 145,787,800 |
| 13 | Bukit Saloka | 0021406357 | 813,635,000 | 329,776,800 | 325,454,000 | 158,404,200 |
| 14 | Krayan Sentosa | 0021406982 | 959,211,000 | 388,007,200 | 383,684,400 | 187,519,400 |
| 15 | Kayungo Sari | 0021407000 | 781,656,000 | 316,985,200 | 312,662,400 | 152,008,400 |
| 16 | Belimbing | 0021405331 | 777,140,000 | 315,178,800 | 310,856,000 | 151,105,200 |
| 17 | Tajur | 0021405240 | 907,040,000 | 367,138,800 | 362,816,000 | 177,085,200 |
| 18 | Tiwei | 0021405322 | 741,001,000 | 300,723,200 | 296,400,400 | 143,877,400 |
| 19 | Long Gelang | 0021405340 | 753,088,000 | 305,558,000 | 301,235,200 | 146,294,800 |
| 20 | Krayan Bahagia | 0021407015 | 905,669,000 | 366,590,400 | 362,267,600 | 176,811,000 |
| 21 | Sawit Jaya | 0021407024 | 787,630,000 | 319,374,800 | 315,052,000 | 153,203,200 |
| 22 | Sekurou Jaya | 0021406360 | 769,646,000 | 312,181,200 | 307,858,400 | 149,606,400 |
| 23 | Olung | 0021405290 | 819,053,000 | 331,944,000 | 327,621,200 | 159,487,800 |
| 24 | Muara Adang | 0021405226 | 1,663,973,000 | 669,912,000 | 665,589,200 | 328,471,800 |
| 25 | Atang Pait | 0021419028 | 856,375,000 | 346,872,800 | 342,550,000 | 166,952,200 |

| | | | | | | |
|----------|-------------------------|------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5 | Long Kali | | 20,227,504,000 | 8,177,457,600 | 8,091,001,600 | 3,959,044,800 |
| 1 | Gunung Putar | 0021418978 | 737,162,000 | 299,187,600 | 294,864,800 | 143,109,600 |
| 2 | Bente Tualan | 0021405492 | 871,568,000 | 352,950,000 | 348,627,200 | 169,990,800 |
| 3 | Muara Adang II | 0021417424 | 743,917,000 | 301,889,600 | 297,566,800 | 144,460,600 |
| 4 | Perkuwen | 0021405548 | 836,605,000 | 338,964,800 | 334,642,000 | 162,998,200 |
| 5 | Muara Pias | 0021405526 | 928,679,000 | 371,471,600 | 371,471,600 | 185,735,800 |
| 6 | Muara Telake | 0021405466 | 953,126,000 | 385,573,200 | 381,250,400 | 186,302,400 |
| 7 | Pinang Jatus | 0021405555 | 949,122,000 | 383,971,600 | 379,648,800 | 185,501,600 |
| 8 | Sebakung Taka | 0021415332 | 845,138,000 | 342,378,000 | 338,055,200 | 164,704,800 |
| 9 | Sebakung | 0021405475 | 1,489,756,000 | 600,225,200 | 595,902,400 | 293,628,400 |
| 10 | Mendik Karya | 0021407051 | 810,671,000 | 324,268,400 | 324,268,400 | 162,134,200 |
| 11 | Mendik Bhakti | 0021407062 | 779,098,000 | 315,962,000 | 311,639,200 | 151,496,800 |
| 12 | Muara Toyu | 0021405539 | 1,034,216,000 | 418,009,200 | 413,686,400 | 202,520,400 |
| 13 | Mendik | 0021405500 | 1,075,700,000 | 434,602,800 | 430,280,000 | 210,817,200 |
| 14 | Mendik Makmur | 0021406385 | 1,033,244,000 | 417,620,400 | 413,297,600 | 202,326,000 |
| 15 | Maruat | 0021417416 | 776,199,000 | 314,802,400 | 310,479,600 | 150,917,000 |
| 16 | Putang | 0021419001 | 751,286,000 | 304,837,200 | 300,514,400 | 145,934,400 |
| 17 | Munggu | 0021405517 | 888,874,000 | 359,872,400 | 355,549,600 | 173,452,000 |
| 18 | Muara Lambakan | 0021405560 | 1,203,665,000 | 485,788,800 | 481,466,000 | 236,410,200 |
| 19 | Makmur Jaya | 0021400122 | 804,778,000 | 326,234,000 | 321,911,200 | 156,632,800 |
| 20 | Kepala Telake | 0021405573 | 1,058,045,000 | 427,540,800 | 423,218,000 | 207,286,200 |
| 21 | Sebakung Makmur | 0021417394 | 801,883,000 | 325,076,000 | 320,753,200 | 156,053,800 |
| 22 | Petiku | 0021417408 | 854,772,000 | 346,231,600 | 341,908,800 | 166,631,600 |
| 6 | Muara Komam | | 10,515,924,000 | 4,258,243,200 | 4,206,369,600 | 2,051,311,200 |
| 1 | Muara Payang | 0021405433 | 806,255,000 | 326,824,800 | 322,502,000 | 156,928,200 |
| 2 | Long Sayo | 0021405424 | 789,767,000 | 320,229,600 | 315,906,800 | 153,630,600 |
| 3 | Binangon | 0021405392 | 833,508,000 | 337,726,000 | 333,403,200 | 162,378,800 |
| 4 | Muara Langon | 0021405387 | 946,676,000 | 382,993,200 | 378,670,400 | 185,012,400 |
| 5 | Prayon | 0021405415 | 782,842,000 | 317,459,600 | 313,136,800 | 152,245,600 |
| 6 | Uko | 0021405368 | 761,977,000 | 309,113,600 | 304,790,800 | 148,072,600 |
| 7 | Muara Kuaro | 0021405400 | 904,201,000 | 366,003,200 | 361,680,400 | 176,517,400 |
| 8 | Lusan | 0021405440 | 1,162,653,000 | 469,384,000 | 465,061,200 | 228,207,800 |
| 9 | Swan Slutung | 0021405455 | 1,026,375,000 | 414,872,800 | 410,550,000 | 200,952,200 |
| 10 | Sekuan Makmur | 0021417335 | 850,067,000 | 344,349,600 | 340,026,800 | 165,690,600 |
| 11 | Batu Butok | 0021405355 | 822,687,000 | 333,397,600 | 329,074,800 | 160,214,600 |
| 12 | Selerong | 0021418404 | 828,916,000 | 335,889,200 | 331,566,400 | 161,460,400 |
| 7 | Muara Samu | | 7,315,229,000 | 2,964,996,800 | 2,926,091,600 | 1,424,140,600 |
| 1 | Rantau Bintungan | 0021404759 | 786,085,000 | 318,756,800 | 314,434,000 | 152,894,200 |
| 2 | Luan | 0021404717 | 790,844,000 | 320,660,400 | 316,337,600 | 153,846,000 |
| 3 | Muara Andeh | 0021417271 | 825,583,000 | 334,556,000 | 330,233,200 | 160,793,800 |
| 4 | Suweto | 0021404724 | 779,763,000 | 316,228,000 | 311,905,200 | 151,629,800 |
| 5 | Tanjung Pinang | 0021404683 | 756,051,000 | 306,743,200 | 302,420,400 | 146,887,400 |
| 6 | Muser | 0021404731 | 880,182,000 | 356,395,600 | 352,072,800 | 171,713,600 |
| 7 | Rantau Atas | 0021404698 | 901,468,000 | 364,910,000 | 360,587,200 | 175,970,800 |
| 8 | Biu | 0021404748 | 777,484,000 | 315,316,400 | 310,993,600 | 151,174,000 |
| 9 | Libur Dinding | 0021404706 | 817,769,000 | 331,430,400 | 327,107,600 | 159,231,000 |
| 8 | Pasir Belengkong | | 12,915,621,000 | 5,231,090,400 | 5,166,248,400 | 2,518,282,200 |
| 1 | Suatang | 0021404972 | 746,120,000 | 302,770,800 | 298,448,000 | 144,901,200 |
| 2 | Suliliran | 0021404984 | 1,118,014,000 | 451,528,400 | 447,205,600 | 219,280,000 |
| 3 | Suatang Keteban | 0021400076 | 754,754,000 | 306,224,400 | 301,901,600 | 146,628,000 |
| 4 | Keresik Bura | 0021405035 | 793,045,000 | 321,540,800 | 317,218,000 | 154,286,200 |
| 5 | Laburan | 0021405015 | 1,006,305,000 | 406,844,800 | 402,522,000 | 196,938,200 |
| 6 | Damit | 0021404967 | 942,209,000 | 381,206,400 | 376,883,600 | 184,119,000 |
| 7 | Olong Pinang | 0021418358 | 768,194,000 | 311,600,400 | 307,277,600 | 149,316,000 |
| 8 | Sunge Batu | 0021418374 | 870,624,000 | 352,572,400 | 348,249,600 | 169,802,000 |
| 9 | Laburan Baru | 0021406340 | 834,209,000 | 338,006,400 | 333,683,600 | 162,519,000 |
| 10 | Pasir Belengkong | 0021404995 | 924,925,000 | 374,292,800 | 369,970,000 | 180,662,200 |
| 11 | Lempesu | 0021404941 | 789,183,000 | 319,996,000 | 315,673,200 | 153,513,800 |
| 12 | Sangkuriman | 0021405002 | 757,416,000 | 307,289,200 | 302,966,400 | 147,160,400 |
| 13 | Suliliran Baru | 0021405028 | 1,006,940,000 | 407,098,800 | 402,776,000 | 197,065,200 |
| 14 | Bekoso | 0021404952 | 758,378,000 | 307,674,000 | 303,351,200 | 147,352,800 |
| 15 | Seniung Jaya | 0021407046 | 845,305,000 | 342,444,800 | 338,122,000 | 164,738,200 |

| | | | | | | |
|---------------|------------------------|------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 9 | Tanah Grogot | | 13,356,862,000 | 5,407,586,800 | 5,342,744,800 | 2,606,530,400 |
| 1 | Tepian Batang | 0021405053 | 828,080,000 | 335,554,800 | 331,232,000 | 161,293,200 |
| 2 | Muara Pasir | 0021405135 | 1,078,604,000 | 435,764,400 | 431,441,600 | 211,398,000 |
| 3 | Jone | 0021405117 | 849,400,000 | 344,082,800 | 339,760,000 | 165,557,200 |
| 4 | Janju | 0021405040 | 776,143,000 | 314,780,000 | 310,457,200 | 150,905,800 |
| 5 | Sungai Langir | 0021417378 | 839,757,000 | 340,225,600 | 335,902,800 | 163,628,600 |
| 6 | Perepat | 0021415383 | 813,282,000 | 329,635,600 | 325,312,800 | 158,333,600 |
| 7 | Senaken | 0021419010 | 817,262,000 | 331,227,600 | 326,904,800 | 159,129,600 |
| 8 | Tapis | 0021418986 | 766,184,000 | 310,796,400 | 306,473,600 | 148,914,000 |
| 9 | Pulau Rantau | 0021417360 | 1,288,237,000 | 519,617,600 | 515,294,800 | 253,324,600 |
| 10 | Padang Pengrapat | 0021405148 | 900,027,000 | 364,333,600 | 360,010,800 | 175,682,600 |
| 11 | Rantau Panjang | 0021405120 | 762,206,000 | 309,205,200 | 304,882,400 | 148,118,400 |
| 12 | Sempulang | 0021405108 | 757,701,000 | 307,403,200 | 303,080,400 | 147,217,400 |
| 13 | Tanah Periuk | 0021405064 | 920,625,000 | 372,572,800 | 368,250,000 | 179,802,200 |
| 14 | Pepara | 0021405071 | 805,288,000 | 326,438,000 | 322,115,200 | 156,734,800 |
| 15 | Sungai Tuak | 0021405081 | 1,154,066,000 | 465,949,200 | 461,626,400 | 226,490,400 |
| 10 | Tanjung Harapan | | 9,907,010,000 | 3,988,740,800 | 3,962,804,000 | 1,955,465,200 |
| 1 | Senipah | 0021417351 | 1,012,808,000 | 409,446,000 | 405,123,200 | 198,238,800 |
| 2 | Tanjung Aru | 0021404899 | 1,376,820,000 | 550,728,000 | 550,728,000 | 275,364,000 |
| 3 | Lori | 0021415324 | 1,868,449,000 | 751,702,400 | 747,379,600 | 369,367,000 |
| 4 | Keladen | 0021404870 | 1,433,554,000 | 577,744,400 | 573,421,600 | 282,388,000 |
| 5 | Labuankallo | 0021415341 | 1,617,432,000 | 651,295,600 | 646,972,800 | 319,163,600 |
| 6 | Selengot | 0021415375 | 1,707,850,000 | 687,462,800 | 683,140,000 | 337,247,200 |
| 7 | Random | 0021417343 | 890,097,000 | 360,361,600 | 356,038,800 | 173,696,600 |
| Jumlah | | | 125,217,974,000 | 50,675,090,400 | 50,087,189,600 | 24,455,694,000 |

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER

ttd

ANDI AZIS
NIP 19680816 199803 1 007